

**PENGARUH KONDISI EKONOMI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT
KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(PADA UMKM KRIPIK TEMPE), KECAMATAN BLIMBING,
KOTA MALANG.**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



OLEH:

MARTA BORA

NIM: 2019110001

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk melihat betapa pentingnya uang. Citizen Mindfulness dan Tingkat Konsistensi Warga (Pada UMKM Keripik Tempe), Lokal Blimbing Kota Malang. Pendekatan pemeriksaan kuantitatif adalah investigasi. Seluruh visioner bisnis UMKM Kripik Tempe, Wilayah Blimbing, dan warga Kota Malang dilibatkan dalam penelitian ini. Total 10 UMKM, 100 responden. Studi adalah komponen dari proses pengumpulan data. Informasi penting yang diperoleh melalui ikhtisar yang diperoleh melalui surat kepada responden adalah jenis informasi yang diingat untuk ujian. Banyak analisis kemunduran menggunakan teknik penyaringan data sederhana. Konsep informasi dalam penelitian ini dievaluasi menggunakan dua tes: satu tes legitimasi dan satu tes kualitas tidak berubah. Untuk mengevaluasi hipotesis eksplorasi, gunakan uji R², F, dan t. Berdasarkan temuan penelitian ini, faktor penentunya antara lain keadaan keuangan, kepedulian warga, dan tingkat kepercayaan terhadap konsistensi warga (pada UMKM Keripik Tempe) di Kawasan Blimbing Kota Malang.

Kata Kunci: *Kondisi Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dikatakan bahwa penyewa memiliki pola pikir penduduk yang sangat kuat ketika mereka bersedia atau kompeten secara hukum untuk memenuhi tugas evaluatif mereka dengan menentukan persyaratan, mengejar tujuan yang sah, dan menyatakan permintaan tanpa hambatan. Kecerdasan masyarakat yang pada dasarnya tidak terbatas menunjukkan bahwa kewajiban yang harus dibayar bukannya tidak berubah sama sekali. Menurut Ermawati (2018), budaya Indonesia cukup tidak konsisten karena masyarakat disana kurang menghargai nilai uang yang dikeluarkan untuk bantuan pemerintah daerah yang diberikan negara. Kepercayaan yang dianut secara luas adalah bahwa kebijakan penetapan harga mempersulit masyarakat untuk membayar utangnya. Para profesional layanan publik telah lama berjuang dengan konsistensi masyarakat. Rendahnya tingkat konsistensi penduduk berdampak langsung pada rendahnya tingkat penilaian di Indonesia belakangan ini.

Mayoritas upaya pemerintah untuk memajukan negara didukung oleh permintaan terungkap dari investigasi tahun 2015 yang dilakukan Andayu, Topowijoyo, dan Sulasmiyati. Kemajuan tidak lepas dari kemampuan profesional publik dalam memberikan dukungan pemerintah, komunikasi, dan prestasi individu. Pendapatan permintaan mempunyai dampak positif yang kuat terhadap pendapatan negara. Instansi pemerintah seringkali memasukkan uang ini ke dalam Rencana Penggunaan Kas dan Pemanfaatan Negara (APBN), dimana. Dalam menghitung pembayaran kewajiban impor dalam negeri, Nilai Tambah (Tangki) digunakan untuk menghitung Pembayaran Pemakaian Tahunan (PPH), Pembayaran Pemakaian Orang Pribadi dan Badan, serta Pembayaran Evaluasi lainnya. Metode Self Evaluation menggantikan struktur Power Assessment dalam kerangka pengalokasian tugas di Indonesia pada tahun 2009. Individu diberikan kemampuan untuk menghitung, mencatat, dan melaporkan kewajiban penggunaannya sendiri sesuai dengan metode Self Assessment (Masta, 2011). Menurut Sukirman (2011), sistem tanggung jawab ini sangat mengantisipasi warga negara yang dapat diandalkan dalam menentukan berapa besar utangnya dan membayarnya. Struktur Evaluasi Diri digunakan dengan mempertimbangkan kemungkinan orang tidak dapat memenuhi kewajiban ujiannya sesuai dengan pengaturan karena kelalaian, kedengkian, atau mungkin faktor lainnya. Kerja dinamis para pakar konsumsi masuk dalam batas pesanan, dan kepengurusan tersebut merupakan hasil kepercayaan warga.

Sifat asli seorang penduduk dapat berubah sebagai akibat dari berbagai penyesuaian pada sistem penilaian wajib. Orang yang bertanggung jawab membayar utangnya, teliti dalam menjalankan tugasnya, siap memenuhi komitmennya, terkendali, dan dapat dipercaya dalam menjalankannya akan diingat oleh masyarakat (biaya dapat diterima). Persyaratan belanja ini menuntut warga untuk bekerja keras menyelesaikan pilihan biaya sesuai dengan konsistensi warga. Menurut Santoso (2018), kemampuan atau semangat penghuni untuk memenuhi tanggung jawab keuangannya sesuai dengan norma dan pedoman materiil tanpa harus mengalami paksaan, pengawasan, dan lain-lain merupakan faktor kunci dalam membayar penghuni secara konsisten (charge electorate).

Menurut Pasaribu dan Christian (2017), warga secara konsisten mengingat kembali pemahaman akan pentingnya kewajiban utama membayar dengan jujur, menghitung utang yang terhutang dengan tepat, menyampaikan Surat Peringatan (SPT) tepat waktu, dan membayar biaya yang bahkan tidak dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Jika semuanya perlu diselesaikan seluruhnya.

Ekuitas, afiliasi dengan kantor retribusi, sanksi yang dijatuhkan, denda yang dikeluarkan, tarif retribusi, dan variabel segmen merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi konsistensi warga yaitu komponen finansial dan non finansial. Pertimbangan segmen dalam penelitian berhubungan langsung dengan populasi atau citizen (WP) dari topik pengeluaran itu sendiri. Terdapat kategori lain untuk variabel segmen, termasuk kategori usia, orientasi, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, skala gaji, dan status perkawinan. Menurut Jackson dan Milliron (2019), hasil dari penetapan durasi tugas menunjukkan bahwa penduduk yang lebih tua seringkali lebih menerima dibandingkan penduduk yang lebih muda. Menurut penelitian, orang yang berpenghasilan lebih banyak lebih jujur dalam mengungkapkan pengeluarannya dibandingkan mereka yang berpenghasilan lebih sedikit. Peluang dan tarif yang wajar merupakan faktor kunci dalam konsistensi warga negara dengan konsistensi. Argumen bahwa tarif pungutan yang terus berkembang tidak sama dengan konsistensi masyarakat dengan pendapatan lebih rendah digunakan untuk menghimbau masyarakat yang konsisten memperoleh gaji besar agar menghindari pungutan. Bagaimanapun, menurut penelitian Abb Al-Mamun et al. (2015), besaran gaji tidak berpengaruh terhadap konsistensi warga.

Otoritas publik akhir-akhir ini lebih mementingkan konsistensi warga negara. Peluang ini muncul karena tidak ada seorang pun yang diharuskan menanggung biaya meskipun mereka sadar

betapa pentingnya biaya tersebut bagi kemajuan bangsa. Kemungkinan alasan mengapa orang menggunakan taktik pengalihan dan melakukan pembayaran untuk layanan. Penerimaan negara dari retribusi dipengaruhi oleh strategi pembelanjaan atau penghindaran pajak (*discouring strategy*) yang dilakukan oleh badan publik. Otoritas publik dapat menggunakan beberapa pendekatan, seperti konsistensi warga negara, selain sekadar menjalankan rencana penghindaran pajak, untuk mengetahui karakteristik yang melekat pada warga negara.

Konsistensi tagihan mungkin benar-benar disamakan dengan pembenaran atau motivasi utama seseorang untuk membayar utangnya, dan konsistensi warga negara dapat membantu meningkatkan pembenaran tersebut. Menurut Togler (2003), pendorong utama penyelesaian tuduhan adalah konsistensi warga. Kewajiban juga dapat dilihat sebagai tekad yang tulus untuk membayar kembali utang atau sebagai keyakinan tentang kontribusi yang dapat diberikan oleh pembayaran utang kepada masyarakat (Togler dan Schneider, 2003).

Dalam analisis ini, beberapa faktor pendukung konsistensi muatan akan dilihat. Yang pertama dan terpenting, komponen segmen adalah ciri-ciri yang harus diketahui oleh penghuni sebenarnya, seperti umur, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Rencana otoritas pengeluaran, yang memungkinkannya mengembangkan motivasi kritis masyarakat dalam membayar retribusi, merupakan komponen kedua dari penghindaran pajak. Jumlah kemampuan finansial atau gaji yang ditransfer oleh warga negara merupakan faktor ketiga yang digunakan untuk menentukan situasi keuangan mereka. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan para ahli pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya berada pada urutan keempat atau terakhir.

Analisis akan menggabungkan beberapa aspek dari investigasi tersebut di atas, termasuk faktor situasi keuangan, faktor kesadaran warga, dan tingkat kepercayaan terhadap faktor konsistensi. Sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul. “ **(PENGARUH KONDISI EKONOMI, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (PADA UMKM KRIPIK TEMPE), KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permasalahan khusus pakar ini adalah:

1. Apakah konsistensi warga negara dipengaruhi oleh kondisi keuangan?
2. Apakah konsistensi antar warga dipengaruhi oleh kesadaran warga?
3. Apakah ada hubungan antara kepercayaan dan konsistensi warga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan eksplorasi berikut ini harus dipenuhi berdasarkan definisi masalahnya:

1. Untuk mengetahui bagaimana situasi keuangan mempengaruhi konsistensi warga.
2. Untuk mengetahui pengaruh konsistensi warga terhadap kesadaran warga.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap konsistensi warga.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan-tujuan tersebut di atas menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini, yang diharapkan dapat memberikan sejumlah dampak yang bermanfaat.

1. Bagi Peneliti

Hal ini diyakini dapat memberikan lebih banyak informasi mengenai konsistensi beban. warga negara yang selama ini masih disalahpahami, serta sudut pandang yang mungkin mendukung penciptaan pengetahuan sebagai kontribusi analisis lebih lanjut.

2. Bagi Pemerintah

Hal ini diyakini dapat memberikan informasi mengenai konsistensi warga negara kepada pihak-pihak yang menginginkannya, meningkatkan motivasi individu untuk menjunjung tinggi kewajiban dan mendorong masyarakat secara keseluruhan untuk berperilaku lebih sesuai dengan konsistensi warga negara.

3. Bagi Peneliti Tertentu

Manfaatnya adalah berfungsi sebagai bentuk perspektif terhadap penelitian yang menghasilkan dan memanfaatkannya sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Brata, Januar Dio Yuningsi, dan Agus Iwan K. (2017), Pengaruh Kondisi Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha, dan pekerjaan di UMKM Kripik Tempe, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Ghozali, Imam (2018) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib orang pribadi yang melakukan aktivitas atau kegiatan berupa usaha UMKM Kripik Tempe, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Handayani, Fice, Bachtiar, dan Nur Khomariah (2019), faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kripik Tempe, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Purnamasi, Apriani (2016) Pengaruh pemahaman, Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 pada Wajib Pajak UMKM Kripik Tempe, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Setiawan, Eko Yudi (2015), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM yang terdaftar di perusahaan Kripik Tempe, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Suyono, N.A, (2016) Faktor- faktor yang mempengaruhi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan membayar pajak pada UMKM Kripik Tempe, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Santoso, Singgi. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Di ponegoro.
- Ihsan, Muchsin. (2013). “Pengaruh Pengetahuan Kepatuhan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Siregar, Syofian. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Gulton, Gazzely Fidhel. (2016). Pengaruh Dimensi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Pada UMKM Berbasis Budaya di Kota Malang). Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.
- Pandiangan, Liberty. (2014). Mudahnya Menghitung Pajak UMKM. Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Rahma, Madjidainum (2019) Pengaruh Transparansi Pajak dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di wilayah UMKM Kripik Tempe, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Setiawan, Eko Yudi (2015), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada pelaporan Kewajiban Pajak di UMKM yang terdaftar di KPP Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Adhimatra, A. A. G.W, & Noviani, N, (2018). Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor pelayanan pajak pertama di Kecamatan Blimbing Kota Malang.
- Gultom, M., F. G (2016). Pengaruh di mensi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ilmiah Mahasiswa FEB, 3(1),58-73.
- Khaerunisa, I., & Wiranto, A. (2015). Pengaruh Pajak, Budaya Pajak, dan *good governance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Riset Akuntansi dan Perpajakan,1(2), 211-224.
- Pratiwi, I. G. A. M. A. M, & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas pendapatan UMKM Kripik Tempe, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan konsep dan aspek Kepatuhan Wajib Pajak, In *Rekayasa Sains: Kecamatan Blimbing, Kota Malang*.
- Ramadhan, L. Y. (2017). Pengaruh kesadaran, pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada UMKM di Kota Malang). *Equity*. 3(3), 16-33

- Saputra, R. (2015). Pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan studi empiris pada wajib pajak di Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Sularsih, H. (2018). Dampak penerapan peraturan pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap peningkatan pajak UMKM di Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Tene, J. H. Sondakh, J.& Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama UMKM Kripik Tempe Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
- Tirada, T. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di UMKM Kripik Tempe, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.